

LAPORAN INVESTASI SOSIAL PTFI 2019





DAFTAR ISI

3	KATA PENGANTAR
4	RINGKASAN EKSEKUTIF
6	TATA KELOLA PROGRAM INVESTASI SOSIAL
8	KESEHATAN
10	PENDIDIKAN
12	EKONOMI
16	INFRASTRUKTUR
18	HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA LOKAL
23	DUKUNGAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA LOKAL
24	BUDAYA
25	HAK ASASI MANUSIA
26	LAMPIRAN

Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia (PTFI) Tahun 2019 kami persembahkan sebagai bentuk inisiatif untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel tentang program-program yang kami lakukan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan merupakan hal mendasar dalam operasi dan strategi bisnis kami. PTFI berharap laporan ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam memantau kinerja investasi sosial perusahaan dari waktu ke waktu.

Investasi sosial PTFI telah menjadi komitmen perusahaan dalam rangka memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam masa peralihan dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah yang penuh tantangan, kami berusaha memenuhi komitmen kami dalam pengembangan masyarakat. Di tahun 2019, kami melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keselarasan program investasi sosial perusahaan dengan rencana pembangunan daerah. Penyelarasan ini sebagai bentuk dukungan kami dalam rencana pembangunan daerah dan upaya menuju keberlanjutan program investasi sosial. Dokumen Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi salah satu bentuk penyelarasan tersebut. Rencana Induk PPM mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku dengan memperhatikan rencana pembangunan daerah. Kami juga terus mengidentifikasi peluang-peluang yang ada untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui program investasi sosial kami.

Menjaga hubungan baik dan konstruktif dengan lembaga-lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi perusahaan menjadi salah satu cara kami dalam melakukan investasi sosial. Transformasi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), sebagai lembaga pengelola Dana Kemitraan PTFI, merefleksikan komitmen kami dalam pengembangan kapasitas mitra kami dalam program investasi sosial. LPMAK kini bertransformasi menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Perubahan ini tidak hanya terbatas pada perubahan badan hukum tetapi juga organisasi dan cara kerja yang baru. Kami terus mendorong keterlibatan dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam semangat sinergitas untuk memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi dan dukungan kepada perusahaan dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan akan mendorong tercapainya keberlanjutan program-program investasi sosial perusahaan bagi masyarakat dan daerah.

Salam hangat,



Horst-Dieter Garz

Wakil Presiden Eksekutif

Perencanaan Perusahaan dan Strategi Bisnis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program investasi sosial PT Freeport Indonesia terus berjalan untuk memberikan manfaat terbaik dari kehadiran perusahaan. Komitmen yang terus dipegang oleh perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di sekitar area perusahaan diwujudkan melalui program-program di berbagai bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, infrastruktur, hubungan dengan masyarakat, dan hak asasi manusia. Pada tahun 2019, PTFI menginvestasikan \$ 62,8 juta dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kami melanjutkan usaha untuk merintis kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari langkah-langkah mencapai keberlanjutan. Dalam pengelolaan program investasi sosial, kami juga meningkatkan penyelarasan dengan peraturan nasional yang berlaku dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta rencana pembangunan daerah.

Program Kesehatan. PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui klinik-klinik yang kami bangun di beberapa tempat di Kabupaten Mimika. Klinik-klinik tersebut memberikan pelayanan kesehatan lebih dari 33.000 kunjungan pasien pada tahun 2019. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) juga terus memberikan pelayanan kesehatan sebanyak lebih dari 152.400 kunjungan pasien. Masyarakat memperoleh berbagai layanan kesehatan yang diperlukan melalui fasilitas-fasilitas tersebut. Pada tahun 2019, RSMM juga mulai menyelaraskan pelayanan rumah sakit dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah, salah satunya dengan penambahan fasilitas yang diperlukan.

Berbagai program promosi kesehatan dan pengendalian penyakit terus berjalan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pusat Pengendalian Malaria Timika merupakan salah satu bentuk kolaborasi perusahaan dengan pemangku kepentingan lain dalam usaha pengendalian malaria. Pusat ini melakukan

berbagai program seperti penyemprotan pada lebih dari 26.300 rumah dan promosi kesehatan tentang malaria yang diikuti oleh lebih dari 33.500 orang. Pada tahun 2019, sebanyak 1.600 orang mengikuti pemeriksaan dan konseling sukarela sebagai bagian dari program pengendalian HIV/AIDS. PTFI juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang aksesnya terbatas.

Program Pendidikan. Program beasiswa yang telah berjalan sejak tahun 1996 terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Pada tahun 2019, sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMK (46 persen dari Suku Amungme, 26 persen dari Suku Kamoro, dan 28 persen dari suku-suku lain di Papua). Mereka menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di berbagai institusi pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, dan luar negeri.

Asrama yang dibangun oleh LPMK dan dikelola oleh lembaga-lembaga mitra melanjutkan pendidikan dan pelayanan kepada 1.051 siswa. Kami juga mengelola Asrama Tomawin bagi 60 anak-anak Suku Amungme di Dataran Tinggi. Kami terus membangun kemitraan dengan pemerintah melalui pengiriman guru ke sekolah-sekolah di Dataran Tinggi. Kami mendidik generasi muda Papua sebagai tenaga kerja handal dalam bidang pertambangan melalui Institut Pertambangan Nemangkawi. Sejak awal program, lebih dari 4.000 siswa telah mengikuti program ini di mana sekitar 2.700 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI dan perusahaan kontraktor.

Program Ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi di sekitar area tambang memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Program peternakan menciptakan lapangan kerja bagi 437 orang di mana 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Fasilitas peternakan ini juga menjadi pusat pelatihan peternakan bagi pelajar sekolah kejuruan, peternak, dan institusi

pemerintah di Mimika dan kabupaten lain di Papua. Program budidaya kakao juga melibatkan 325 petani lokal di mana 55 persen merupakan masyarakat asli Papua. Pada tahun 2019, program Usaha Mikro Kecil dan Menengah kami memberikan pendampingan usaha bagi 182 pengusaha binaan asal Papua di mana 70 persen diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.400 orang dan menghasilkan pendapatan lebih dari Rp. 256 miliar. Sejak awal program di tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan sebesar Rp. 61 miliar.

Program Infrastruktur Bagi Masyarakat. Pada tahun 2019, kami menginvestasikan sekitar US\$ 2,2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa di dataran tinggi, termasuk: pembangunan jembatan di Banti, instalasi air bersih, dan pengelolaan fasilitas microhydro 176 kilo watt di Banti. Fasilitas microhydro tersebut menyediakan listrik bagi sekitar 500 keluarga di daerah tersebut. Beberapa program infrastruktur di dataran tinggi yang kami rencanakan pada tahun 2019 tidak dapat berjalan karena belum adanya ijin keamanan sebagai dampak gangguan keamanan pada tahun sebelumnya. Di dataran rendah, kami juga telah menginvestasikan US\$ 7,9 juta dalam pembangunan fasilitas dan distribusi air minum untuk kota Timika.

Program Hubungan dengan Masyarakat dan Lembaga. Masyarakat di sekitar PTFI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perusahaan. Kami melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam program-program investasi sosial. Kami juga meneruskan langkah-langkah pengendalian pendulang tanpa ijin dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko sosial dari kegiatan pertambangan. Pada tahun 2019, kami mengelola 60 keluhan dari masyarakat dimana 59 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kami melanjutkan kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal termasuk dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) yang mengelola Dana Kemitraan. Pada tahun 2019, PTFI memberikan kontribusi Dana Kemitraan

sebesar US\$ 27,7 juta kepada LPMK. Sejak awal program pada tahun 1996, kami telah berkontribusi sebesar US\$ 825,7 juta dalam Dana Kemitraan untuk pengembangan masyarakat Papua. Tahun 2019 menjadi tahun penting dalam pengelolaan Dana Kemitraan dimana LPMK bertransformasi menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK). Perubahan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Kemitraan sekaligus bagian dari upaya menuju kemandirian lembaga di masa depan.

Program Budaya. Kami melanjutkan kerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Suku Kamoro. Yayasan tersebut melakukan pendampingan kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Kami juga melanjutkan pendampingan bagi kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Koperasi Kanguru Jaya dalam membuat kerajinan noken yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia.

Program Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2019, PTFI menerima 20 laporan dugaan pelanggaran HAM. Sekitar 560 karyawan PTFI, 5.000 karyawan kontraktor, 2.000 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.072 anggota polisi dan militer. PTFI juga mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan HAM.

Kemitraan menjadi salah satu cara kami dalam menjalankan program-program investasi sosial. Kami ingin memenuhi komitmen kami dalam pengembangan masyarakat sambil merintis kemitraan-kemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan ini penting agar program-program yang telah kami lakukan dapat terus berkelanjutan dan mendorong kemandirian bagi masyarakat. Langkah-langkah strategis akan terus kami lakukan agar kehadiran kami memberi manfaat bagi masyarakat saat ini dan di masa mendatang.

TATA KELOLA PROGRAM INVESTASI SOSIAL

Program-program investasi sosial PT Freeport Indonesia (PTFI) dikelola oleh berbagai divisi yang ada di perusahaan. Pengelolaan program ini merujuk pada prosedur operasi standar investasi sosial dari perusahaan induk kami. Divisi-divisi tersebut meliputi *Community Affairs (CA)*, *Special Projects*, *Corporate Communications*, dan Institut Pertambangan Nemangkawi. Selain itu, program investasi sosial juga dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Seluruh pihak tersebut menjalankan berbagai program yang telah direncanakan dan disetujui untuk pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang.

Pada tahun 2019, PTFI memasuki tahap peralihan dari operasi tambang terbuka Grasberg ke tambang bawah tanah. Pada masa peralihan ini, perusahaan melakukan langkah-langkah penyesuaian biaya untuk mencapai efisiensi di berbagai bidang. Namun demikian, kami terus menjaga komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam program-program investasi sosial. Pada tahun 2019, nilai investasi sosial kami sebesar US\$ 62,8 juta. Di tengah perubahan operasi



PTFI menerima penghargaan sebagai perusahaan tambang dengan program pengembangan masyarakat terbaik untuk enam dari delapan kategori dalam ajang Indonesia Mining Award 2019.

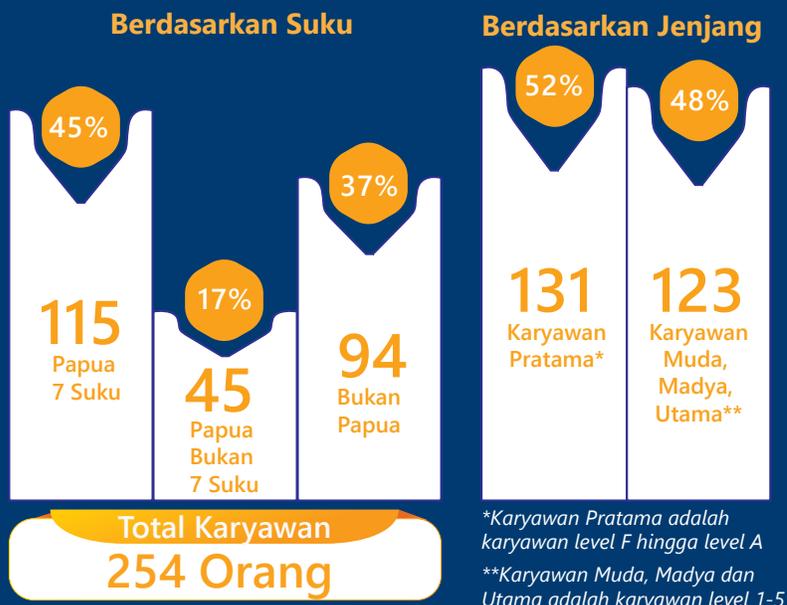
tambang yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, kami tetap berusaha mewujudkan komitmen kami dalam memberikan manfaat terbaik dari kehadiran kami bagi masyarakat sekitar.

Divisi *Community Affairs* menjadi bagian dari perusahaan untuk memastikan komitmen sosial PTFI bagi masyarakat dapat terpenuhi. Program-program investasi sosial direncanakan dan dikoordinasikan bersama dengan seluruh unit di Divisi CA maupun dengan departemen lain di PTFI. Kami terus meningkatkan penilaian kerangka berbasis risiko untuk mengelola risiko-risiko bisnis utama, mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko serta kesempatan sosial yang berdampak pada keberlanjutan operasi perusahaan dan mengurangi risiko bagi masyarakat sekitar. Kami selalu berusaha agar program-program yang kami lakukan sesuai dengan standar dan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan program investasi sosial.

Dalam melakukan komitmen investasi sosial, kami mengikuti dan menyelaraskan dengan peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai bentuk kepatuhan dan kontribusi dalam rencana pembangunan nasional. Pada tahun 2018, Pemerintah RI menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan



Karyawan Divisi *Community Affairs* 2019



Kesehatan dan Keselamatan Kerja *Community Affairs* 2019



masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang. Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Hasil pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat ini selanjutnya digunakan untuk menyusun rencana induk program PPM sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 25 Tahun 2018 dan Keputusan menteri ESDM nomor 1824 Tahun 2018. Pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan masyarakat ini melibatkan masyarakat di sekitar tambang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Penyusunan rencana induk program PPM ini telah kami selesaikan pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, kami juga terlibat aktif dalam serangkaian diskusi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyusunan cetak biru program PPM sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Seluruh usaha penyalarsan ini kami lakukan agar program investasi sosial kami selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan di saat yang sama sejalan dengan program pembangunan nasional dan daerah.

Kami mematuhi standar-standar keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan serta standar keselamatan

nasional dan internasional dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial kami. Pada tahun 2019, Divisi CA berhasil mencapai tingkat Kinerja Akuntabilitas Keselamatan sebesar 99 persen yang melebihi target perusahaan sebesar 95 persen. Untuk memastikan setiap karyawan mematuhi standar keselamatan, para karyawan Divisi CA mengikuti berbagai pelatihan keselamatan kerja seperti pemadaman kebakaran, investigasi insiden, alat pelindung diri, dan pencegahan fatalitas.



Konsultasi dalam penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan organisasi perangkat daerah, termasuk para Kepala Distrik di Kabupaten Mimika.

KESEHATAN

Investasi sosial PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam bidang kesehatan menjadi salah satu kontribusi penting perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Kami terus meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar investasi sosial dalam bidang kesehatan yang telah kami rintis dan jalankan hingga saat ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kemitraan Dalam Pelayanan Fasilitas Kesehatan

PTFI membangun dan mengoperasikan beberapa fasilitas kesehatan yang meliputi klinik kesehatan di Kampung Wangirja (SP 9), Utikini Baru (SP 12), Pomako, Nayaro dan klinik khusus Tuberculosis (TB) dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang menjadi rumah sakit pertama di Mimika juga dibangun dan dioperasikan melalui Dana Kemitraan dari PTFI. Fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal terutama masyarakat dari Tujuh Suku asli Papua di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan dan masyarakat, PTFI terus mendorong kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program kesehatan. Kemitraan

menjadi salah satu prioritas dan strategi kunci dalam mencapai penguatan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah merintis pengelolaan klinik di Pomako yang akan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Kemitraan serupa telah terwujud melalui klinik di Nayaro dan Klinik Tuberculosis dan Klinik Infeksi Menular Seksual yang terintegrasi dengan Puskesmas Timika yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang berada di dataran rendah Kabupaten Mimika juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2019, RSMM melakukan pengembangan beberapa sarana dan prasarana rumah sakit termasuk klinik pratama. Klinik pratama ini akan menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program jaminan kesehatan (BPJS) dari Pemerintah. RSMM telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program ini sejak tahun 2017. Langkah-langkah strategis terus dilakukan bersama dengan pemerintah dalam penyelarasan program ini, termasuk pengembangan infrastruktur maupun administrasi bagi masyarakat. PTFI bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK) terus bekerjasama dengan pemerintah agar masyarakat mendapatkan manfaat terbaik dari program BPJS melalui RSMM.

Kemitraan Dalam Pengendalian Malaria

PTFI meneruskan komitmennya dalam kontribusi pengendalian malaria di Kabupaten Mimika. Berbagai langkah kemitraan telah dilakukan oleh PTFI untuk mencapai hasil terbaik dari program pengendalian malaria ini. PTFI bersama para pemangku kepentingan melaksanakan berbagai program pengendalian malaria melalui Pusat Pengendalian Malaria Timika. Fasilitas ini melakukan berbagai kegiatan yang meliputi konseling dan penyuluhan malaria, penyemprotan, pembagian kelambu, sanitasi lingkungan, pendeteksian kasus malaria dan promosi anti malaria. Pada tahun 2019,



Koordinasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam penyelarasan dan kemitraan program kesehatan bagi masyarakat.

Program Kesehatan Masyarakat 2019



Pelayanan Rumah Sakit

152.490 Kunjungan pasien di Rumah Sakit Mitra Masyarakat

33.093 Kunjungan pasien di klinik-klinik kesehatan yang dikelola PTFI



Pengendalian HIV/AIDS

4.944 Kunjungan pasien di klinik infeksi menular seksual

23 Kasus HIV baru terdeteksi pada tahun 2019

1.662 Orang berpartisipasi dalam program *Voluntary Counseling and Testing (VCT)*

14.322 Orang mengikuti promosi kesehatan tentang HIV/AIDS



Pengendalian Tuberculosis

6.306 Kunjungan pasien di klinik tuberculosis

4.820 Orang mengikuti promosi kesehatan tentang tuberculosis



Pengendalian Malaria

26.377 Rumah mendapatkan penyemprotan (*IRS*)

15.887 Kelambu dibagikan kepada masyarakat

17.723 Slide diperiksa untuk deteksi kasus malaria

33.591 Orang mengikuti promosi kesehatan tentang malaria

terjadi peningkatan kasus malaria di masyarakat baik yang terdeteksi di Puskesmas Timika maupun di klinik-klinik yang dikelola oleh PTFI. Langkah pencegahan terus dilakukan oleh tim Pusat Pengendalian Malaria, salah satunya melalui peningkatan jumlah pembagian kelambu anti nyamuk. Pada tahun 2019, PTFI juga terlibat aktif dalam koordinasi daerah pengendalian malaria sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional XX yang rencananya diadakan pada tahun 2020 di Papua.

Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan Bergerak

Masyarakat di daerah pesisir Kabupaten Mimika memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Klinik bergerak menjadi salah satu kontribusi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Program yang dijalankan oleh LPMK bersama pemerintah daerah dan mitra lainnya ini menyediakan pelayanan kesehatan umum dan spesialis, vaksinasi dan imunisasi, kesehatan ibu dan anak serta penyuluhan kesehatan. Pada tahun 2019, klinik bergerak memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 3.600

orang di wilayah pesisir di empat distrik Kabupaten Mimika. PTFI juga melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan di dataran tinggi. PTFI menyediakan transportasi udara untuk pasien rujukan dari Puskesmas di dataran tinggi ke Timika. Dukungan transportasi juga kami berikan dalam distribusi tenaga kesehatan dan logistik bagi fasilitas kesehatan di dataran tinggi.



Penyemprotan rutin di rumah masyarakat menjadi salah satu program yang efektif dalam pengendalian malaria di Kota Timika.



PENDIDIKAN

Ketersediaan sumber daya manusia yang handal menjadi prioritas utama pembangunan di Papua. Pemerintah Papua menempatkan pendidikan sebagai salah satu isu strategis kewilayahan Papua dengan fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM) terus melanjutkan investasi dalam bidang pendidikan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

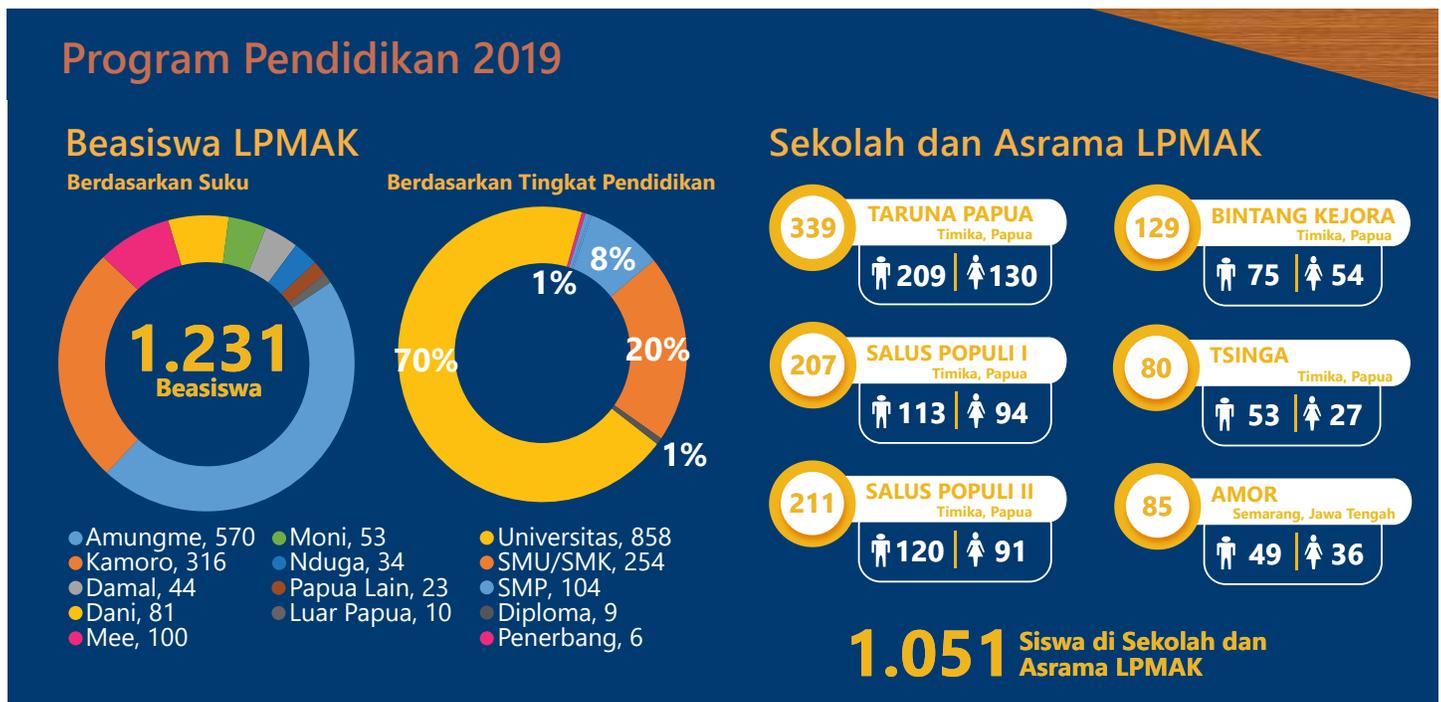
Beasiswa

Program Beasiswa telah menjadi salah satu program yang memberi manfaat besar bagi masyarakat asli Papua di sekitar wilayah perusahaan. Pada akhir tahun 2019, tercatat sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMAM. Mereka berasal dari Suku Amungme (46 persen), Suku Kamoro (26 persen), dan suku-suku lain di Papua (28 persen). Para siswa tersebut menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di Papua, Jawa, Sulawesi dan luar negeri. Beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi

diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di bidang ilmu alam, teknologi, teknik, dan matematika. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala bersama dengan mitra untuk memastikan bahwa para siswa mereka mendapatkan manfaat terbaik dari program beasiswa.

Asrama dan Sekolah

Keterbatasan akses pendidikan menjadi salah satu tantangan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di Papua. Dari delapan belas distrik di Kabupaten Mimika, sebanyak sembilan distrik memiliki sekolah di mana jumlah sekolah terbanyak terdapat di Distrik Mimika Baru, sekitar Kota Timika. Program asrama yang dijalankan oleh LPMAM melalui Dana Kemitraan dari PTFI telah menjadi program unggulan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil di Kabupaten Mimika. Empat asrama beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan satu asrama berada di Semarang, Jawa Tengah. Kelima asrama tersebut memberi manfaat bagi 1.051 siswa pada akhir tahun 2019. Para siswa di asrama-





Sekolah dan Asrama Taruna Papua dapat menampung 1.000 siswa dan menjadi salah satu kompleks pendidikan terbesar di Kabupaten Mimika. LPMK dan pengelola sekolah terus melakukan langkah-langkah agar semakin banyak generasi muda Papua mendapatkan pendidikan di fasilitas ini.

asrama tersebut tidak hanya mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan formal namun juga dibekali dengan pengembangan karakter, seni dan budaya, kemandirian dan ketrampilan dasar lainnya. Pengelolaan asrama-asrama tersebut terus dibenahi agar semakin memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Kampanye dan promosi pendidikan juga terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda asal Papua dalam program peningkatan sumber daya manusia jangka panjang ini.

Institut Pertambangan Nemangkawi

Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan PTFI untuk mempersiapkan generasi muda Papua memasuki dunia kerja khususnya dalam bidang pertambangan. Sejak didirikan tahun 2003, IPN telah melatih lebih dari 4.000 siswa dalam program *Apprentice* dan *Diploma Administrasi Bisnis*. Hingga tahun 2019, sebanyak 2.786 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI maupun perusahaan kontraktor. IPN juga menyelenggarakan *Papuan Bridge Program (PBP)*. Program ini membekali generasi muda Papua yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerja.

Hingga tahun 2019, PBP telah melatih 203 generasi muda Papua (67 persen perempuan) dengan berbagai pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. IPN bekerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan privatisasi dan kontraktor, perusahaan tambang lain di Papua dan institusi pendidikan dalam pengembangan program ini agar program PBP ini dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh daerah maupun industri yang ada di Papua.



Program beasiswa bagi anak-anak Papua telah membuka kesempatan bagi mereka dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.

EKONOMI

PT Freeport Indonesia (PTFI) diakui telah menjadi salah satu penggerak ekonomi di sekitar wilayah operasinya. Kehadiran PTFI mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika. Melalui program investasi sosial perusahaan dalam bidang ekonomi, kami terus melakukan identifikasi peluang dan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal. Pengembangan potensi ekonomi lokal ini juga selalu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah sesuai dengan potensi wilayah adat. Beberapa potensi ekonomi yang kami kembangkan dalam program investasi sosial antara lain program peternakan, perikanan, pengembangan pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah.

Peternakan

Program peternakan yang kami lakukan menyediakan kebutuhan daging ayam dan telur di Kota Timika dan sekitarnya. Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi produk daging ayam dan telur dari luar Papua menjadikan produk dari program peternakan yang kami lakukan ini seluruhnya terserap

oleh pasar lokal. Bersama dengan Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) sebagai mitra dalam program ini, kami melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Peternakan dan Himpunan Peternak Unggas Kabupaten Mimika untuk memastikan kebutuhan ayam dan telur di Kabupaten Mimika terpenuhi dan harga di pasar dapat terjaga.

Program peternakan ini menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan 437 masyarakat lokal sebagai peternak dan karyawan dimana sebanyak 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Para peternak lokal dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan. PTFI melihat adanya potensi yang besar untuk pengembangan peternakan ayam di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, peternakan yang berada di SP 9 dan SP 12 di dataran rendah ini juga menjadi salah satu pusat pelatihan peternakan bagi para pelajar sekolah kejuruan, masyarakat, dan pegawai pemerintah di Kabupaten Mimika maupun kabupaten lainnya di Papua. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang peternakan, program ini diharapkan terus berkembang dan berkelanjutan. PTFI juga terus mencari mitra dalam



Melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, program peternakan kami telah mendorong munculnya peternakan ayam di Kabupaten Mimika sehingga kabupaten ini dapat memenuhi kebutuhan telur lokal secara mandiri.

Program Ekonomi Masyarakat 2019

Peternakan Ayam

437 **Orang**
sebagai peternak dan karyawan; 89% masyarakat asli Papua

41,5 **Miliar Rupiah**
pendapatan peternakan; meningkat 4,3% dari tahun sebelumnya

Pengembangan Kakao

325 **Petani Lokal**
55 % masyarakat asli Papua

219 **Hektar Lahan**
tersebar di berbagai lokasi di dataran rendah

41 **Pelatihan**
diikuti oleh 315 petani kakao

Pengembangan Kopi

158 **Petani Lokal**
seluruhnya masyarakat asli Papua

35 **Hektar Lahan**
tersebar di berbagai lokasi di empat desa dataran tinggi

921 **Juta Rupiah**
penjualan produk kopi yang dikelola koperasi

program peternakan agar program ini dapat semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan. Koordinasi dan kemitraan dengan Dinas Peternakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu kunci dalam merintis kemajuan dan kemandirian program peternakan ini.

Dalam program peternakan ayam, LPMK juga melakukan pendampingan kelompok usaha peternakan ayam petelur dalam mengembangkan usaha mereka. LPMK melanjutkan peternakan sapi di Agimuga dengan memberdayakan masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat setempat membudidayakan ternak sapi melalui pendampingan oleh Universitas Negeri Papua dan Dinas Peternakan Kabupaten Mimika. Kemitraan dan transfer pengetahuan yang semakin baik diharapkan dapat mendorong tercapainya kemandirian masyarakat.

Budidaya Pertanian

Topografi Kabupaten Mimika yang membentang dari dataran rendah hingga dataran tinggi mendorong PTFI untuk melakukan identifikasi potensi pertanian yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Di dataran tinggi, PTFI mendampingi masyarakat dalam

pengembangan potensi budidaya kopi dan sayuran. Budidaya kopi ini dikembangkan di beberapa kebun di Distrik Tembapura dan Hoesa di dataran tinggi sekitar wilayah operasi perusahaan. Program ini melibatkan 158 petani asli Papua yang mengelola 35 hektar lahan pada tahun 2019. Hasil budidaya kopi jenis arabika ini dipasarkan sebagai produk yang dikenal dengan nama dagang Kopi Amungme Gold. Sebagai bagian



Pengembangan kakao merupakan usaha rintisan yang kami lakukan dalam menciptakan alternatif ekonomi potensial bagi masyarakat.

dari usaha merintis keberlanjutan program budidaya kopi ini, PTFI memfasilitasi pembentukan Koperasi Amungme Gold pada tahun 2013. Hingga saat ini, berbagai usaha peningkatan kapasitas anggota dan pengurus koperasi terus dilakukan, tidak terbatas pada peningkatan kapasitas petani namun juga kemampuan manajemen para pengurus yang sebagian besar merupakan masyarakat asli.

Di dataran rendah, kami mendukung budidaya kakao di lebih dari lima belas kampung sasaran. Pada tahun 2019, PTFI bermitra dengan koperasi lokal, Koperasi Kakao Buah Dewa, untuk mendistribusikan bibit kakao dan memberikan pelatihan kepada petani kakao. Per Desember 2019, 325 petani (55 persen petani asli Papua) terlibat dalam program pertanian kakao ini dan mengelola 219 hektar lahan yang tersebar di berbagai lokasi di Kabupaten Mimika.

Perikanan

PTFI, bekerjasama dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) Keuskupan Timika, melakukan pendampingan masyarakat dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air tawar. Dalam program perikanan tangkap ini, para nelayan mendapatkan bantuan untuk pemasaran

hasil tangkapan melalui empat pos pengumpulan ikan di wilayah pesisir dan fasilitas pabrik es mini. Para nelayan tradisional itu juga terus dikembangkan kemampuannya melalui berbagai pelatihan seperti perbaikan motor tempel, perbaikan jaring ikan, dan pembuatan perahu fiber. Pada tahun 2019, sebanyak 17,6 ton ikan hasil tangkapan nelayan Suku Kamoro dipasarkan melalui pos pengumpulan ikan di Otakwa yang terletak di wilayah pesisir timur Kabupaten Mimika.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dana Bergulir

Program usaha kecil, mikro dan menengah mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan pengusaha lokal dalam penyediaan barang dan jasa, meningkatkan daya saing para pengusaha binaan, dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa lokal bagi operasi kami. Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2019, program UMKM memberikan pendampingan kepada 182 pengusaha asli Papua, di mana 70 persen diantaranya merupakan pengusaha asli Papua asal Tujuh Suku. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi 1.477 orang di Kota Timika di mana 62 persen merupakan tenaga kerja asli Papua. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 256,4 miliar.



Masyarakat setempat mendapatkan bantuan sarana, prasarana, bibit, dan pendampingan intensif dalam program perikanan air tawar

Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2019



182 Pengusaha

70% merupakan masyarakat asli Papua asal Tujuh Suku



1.477 Tenaga Kerja

Terserap melalui program UMKM, 45% merupakan masyarakat asli Papua



Rp. 2 Miliar

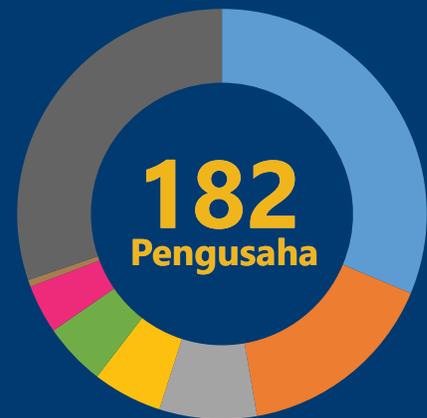
Dana Bergulir bagi sembilan (9) pengusaha binaan



Rp. 256,4 Miliar

Pendapatan pengusaha binaan; Meningkat 28% dari tahun 2018

Berdasarkan Suku



● Amungme, 57

● Kamoro, 29

● Dani, 14

● Moni, 10

● Mee, 9

● Damal, 7

● Nduga, 1

● Papua Lain, 55

Kami juga merintis kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Timika dalam pengembangan pengusaha lokal. Kemitraan ini kami lakukan, salah satunya, dalam penyaluran dana bergulir bagi wirausahawan Papua. Melalui kemitraan ini, para wirausahawan binaan tersebut didampingi untuk meningkatkan kelayakan mereka dalam mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. BRI menjadi penyalur dana bergulir dengan jaminan dari PTFI. Kerjasama ini memberikan alternatif bagi para pengusaha selain mendapatkan bantuan modal dari Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) serta meningkatkan profesionalitas pengusaha binaan dari sisi permodalan. Pada tahun 2019, dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp. 2 miliar bagi sembilan (9) wirausahawan binaan. Sejak awal program di tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan mencapai Rp. 61 miliar. Kami terus mendorong para wirausahawan binaan agar lebih banyak mendapatkan mitra dan pasar dari luar PTFI untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka.

Program dana bergulir LPMK juga menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi 429 pengusaha

mikro asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut bergerak di bidang jasa, kios/ritel, dan berbagai industri rumahan. Program ini menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Pelatihan bagi para wirausahawan dan identifikasi usaha-usaha baru terus dilakukan agar semakin terbuka peluang usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.



Melalui program pengembangan UMKM, kami bermitra dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha-usaha ritel milik pengusaha asli Papua di Kabupaten Mimika.

INFRASTRUKTUR

Beberapa proyek infrastruktur masyarakat telah dibangun oleh PTFI sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Mimika. Proyek-proyek infrastruktur masyarakat yang berasal dari kontribusi perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Kami bekerjasama dengan berbagai mitra dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pembangunan infrastruktur ini kami lakukan di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sekitar area operasi kami.

Proyek Infrastruktur Dataran Tinggi

Program Tiga Desa merupakan program infrastruktur bagi masyarakat di Banti, Tsinga dan Aroanop di wilayah dataran tinggi. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2000, kami telah menginvestasikan lebih dari US\$ 93 juta. Melalui proyek ini, kami menyediakan dana, peralatan, bahan, transportasi dan tenaga kerja untuk

membangun jaringan infrastruktur yang mencakup lebih dari 300 rumah, 400 tangki septik, 3 sekolah, 10 rumah guru, 3 klinik, 3 pasar, 13 gereja, 20 jembatan, generator 225 kilo watt, dan 2 lapangan terbang. Investasi dalam infrastruktur masyarakat telah memberi manfaat bagi sekitar 1.000 orang Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi terpencil ini.

Pada tahun 2019, kami menginvestasikan sekitar US\$ 2,2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa, termasuk: pembangunan jembatan di Banti, instalasi air bersih, dan pengelolaan fasilitas micro hydro Banti 176 kilo watt. Beberapa program infrastruktur di dataran tinggi yang kami rencanakan pada tahun 2019 berjalan kurang optimal karena belum adanya ijin keamanan untuk bekerja di beberapa wilayah dataran tinggi. Gangguan keamanan yang terjadi sejak tahun 2017 berdampak pada adanya pembatasan akses di beberapa lokasi termasuk di lokasi proyek infrastruktur yang kami rencanakan bagi masyarakat. Pada tahun ini, kami terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah



Beberapa fasilitas infrastruktur masyarakat yang dibangun melalui program investasi sosial PTFI diresmikan oleh Menteri ESDM pada tahun 2019.



Fasilitas air bersih di dataran tinggi dan pesisir merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.

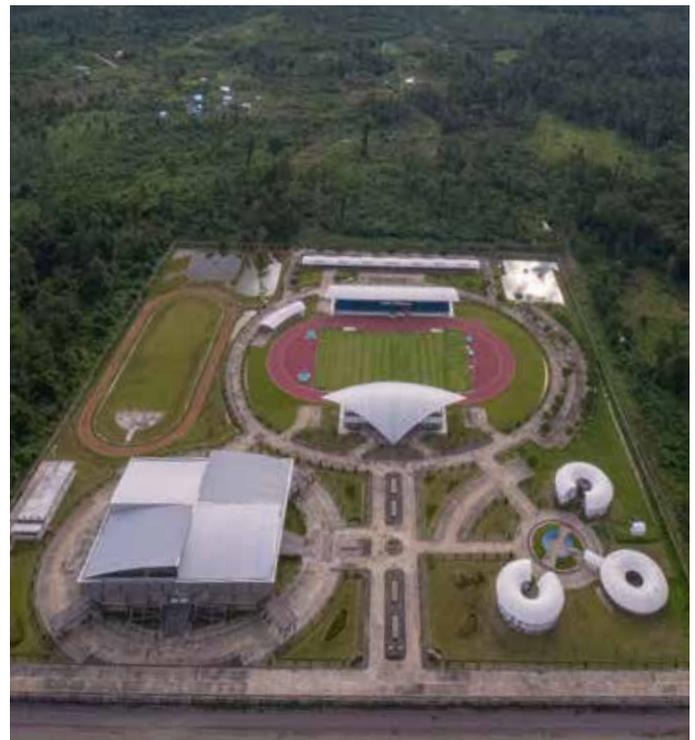
dan tokoh masyarakat untuk melakukan survei dan mengembangkan rencana penyerahan dan pemeliharaan lanjutan aset-aset yang telah selesai dibangun.

Proyek Infrastruktur Dataran Rendah

PTFI menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah pada tahun 2013 untuk membangun fasilitas olahraga kelas dunia yang secara khusus ditujukan untuk mendukung provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang direncanakan diadakan pada tahun 2020. Proyek senilai US\$ 33 juta ini telah selesai dibangun pada tahun 2017. Beberapa fasilitas dalam kompleks ini antara lain stadion terbuka dengan kapasitas 3.500 tempat duduk; stadion tertutup untuk bulu tangkis, bola voli dan bola basket dengan kapasitas 5.500 tempat duduk; lapangan atletik, dua asrama atlet dan berbagai fasilitas pendukung. PTFI mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi kepada kontraktor lokal yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 300 orang, dimana lebih dari 100 orang merupakan orang asli Papua. Meskipun proyek telah selesai, PTFI masih melanjutkan pengelolaan fasilitas sambil bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menunjuk pihak ketiga profesional dalam mengelola fasilitas olahraga ini.

Pada tahun 2013, PTFI bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun fasilitas distribusi air minum ke Kota Timika, daerah perkotaan yang berkembang dan berdekatan dengan wilayah operasi kami. Kami mensponsori studi kelayakan dan studi dampak lingkungan untuk menentukan desain terbaik fasilitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan Timika yang semakin meningkat. Sebagai hasil dari studi ini, kami telah menyumbangkan keahlian teknik dan investasi senilai US\$ 6,4 juta (dari total komitmen US\$10 juta) untuk membangun fasilitas tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pemipaan kota secara bertahap untuk menghubungkan masyarakat Timika ke air minum dari fasilitas ini.

PTFI juga meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat suku Kamoro di Lima Kampung di dataran rendah. Instalasi air bersih yang telah dibangun sejak awal tahun 2000 ini terus dipelihara, ditambah dan ditingkatkan kualitasnya. Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih sebagai bagian untuk mencapai keberlanjutan program.



Kompleks Olahraga Mimika yang dibangun PTFI menjadi kebanggaan masyarakat Mimika dan Papua, terutama untuk mendukung Provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX.

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA LOKAL

PT Freeport Indonesia menyadari pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja kami. Hubungan baik ini diperlukan tidak hanya untuk mendapatkan dukungan sosial bagi operasi kami tetapi juga agar kami dapat memberikan manfaat terbaik dari kehadiran kami bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memaksimalkan manfaat yang positif bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami juga terus berusaha mengurangi dampak negatif dan risiko dari operasi kami terhadap masyarakat sekitar.

Mitigasi Dampak Pengelolaan Tailings

Sesuai ijin dan jaminan regulasi, pasir sisa tambang atau *tailings* yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PTFI dialirkan melalui sebuah sistem sungai aliran *tailings* yang dinamakan *Modified Ajkwa*



Para pemuda Kamoro mendapatkan pelatihan perbaikan generator set sebagai bagian dari penyediaan listrik masyarakat di wilayah pesisir.



Layanan bis membantu masyarakat dari Lima Kampung Kamoro dalam kegiatan sosial ekonomi mereka.

Deposition Area (ModADA). Kami selalu memastikan agar *tailings* tersebut tetap dikelola di dalam area pengendapan sesuai dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengendapan *tailings* tersebut menimbulkan pengaruh pada salah satu jalur transportasi tradisional masyarakat setempat di sekitar Sungai Minajerwi. Pengelolaan *tailings* ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengendapan *tailings*. Menyadari dampak yang terjadi, kami telah berkonsultasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.

Pada tahun 2019, kami melakukan program mitigasi fase kedua dalam pengelolaan *tailings*. Langkah-langkah mitigasi ini lebih terintegrasi dan terkoordinasi melalui Gugus Tugas Mitigasi Dampak Sedimentasi yang terdiri dari berbagai departemen terkait di PTFI. Untuk mengurangi dampak pada jalur transportasi tradisional masyarakat, kami bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi laut bagi masyarakat terdampak. Dalam program transportasi ini, PTFI menyediakan kapal bagi masyarakat di kampung-kampung pesisir yang terdampak. Layanan kapal disediakan bagi masyarakat di Manasari dan Otakwa di pesisir timur Kabupaten Mimika menuju pelabuhan Pomako. Pelabuhan ini

merupakan salah satu akses jalan umum menuju Kota Timika sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selain transportasi laut, kami membantu aksesibilitas masyarakat di Lima Kampung Kamoro yang terdampak melalui penyediaan bis. Layanan ini membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka seperti mengakses dusun tradisional, memasarkan hasil kebun dan perikanan ke Kota Timika.

Mitigasi dampak sosial pengelolaan *tailings* ini juga kami lakukan melalui program penguatan ekonomi bagi masyarakat Suku Kamoro yang terdampak. Pada tahun 2019, kami melanjutkan program ekonomi berbasis kampung dan sejalan dengan pilar mata pencaharian masyarakat Suku Kamoro yaitu sagu, sungai, dan sampan. Bersama dengan aparat kampung dan pemerintah daerah, kami merintis langkah-langkah untuk merevitalisasi kampung-kampung Kamoro menjadi pusat ekonomi masyarakat melalui pengembangan kios-kios kampung, budidaya sagu unggul dan lain sebagainya. Program perikanan juga terus dikembangkan dengan pengoperasian pos pengumpulan ikan di wilayah pesisir dan fasilitas pabrik es mini. Fasilitas ini membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan perikanan. Pada tahun 2019, kami terus merintis kolaborasi dengan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Otakwa, salah satu kampung di pesisir, menjadi pusat ekonomi di bagian timur Kabupaten Mimika. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Kota Timika. Koordinasi dengan KKP terus dilakukan agar SKPT di Otakwa dapat mulai beroperasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pada tahun 2019, kami juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas masyarakat di sekitar area terdampak. Kami memberikan pelatihan perbaikan motor tempel, pembuatan dan perawatan kapal fiber tradisional, serta pembuatan dan perbaikan jaring insang. Pelatihan-pelatihan tersebut kami lakukan untuk mendukung program perikanan bagi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Kami juga memberikan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan

untuk bercocok tanam dan pelatihan budidaya perikanan air tawar. Pelatihan-pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 300 orang di mana sebagian besar merupakan pemuda-pemuda Kamoro. Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengurangi dampak yang kurang menguntungkan dari pengelolaan *tailings* yang berasal dari kegiatan pertambangan kami. Di saat yang sama, kami ingin membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan *tailings*.

Mitigasi Pendulungan Tanpa Ijin

PTFI menggunakan area pengendapan yang telah disetujui di daerah dataran rendah dan pesisir untuk mengelola *tailings* dari kegiatan penambangan. Aliran sungai *tailings* ini menjadi area yang digunakan sejumlah orang untuk kegiatan pendulungan tanpa ijin. Kegiatan pendulungan ini menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, serta memiliki risiko kesehatan dan keselamatan para pendulang itu sendiri. Kami menyadari bahwa tidak ada solusi cepat untuk mengatasi berbagai isu dari kegiatan pendulungan tanpa ijin ini. Namun, kami



Meningkatkan pemahaman pendulang tentang risiko kesehatan dan keselamatan merupakan aspek penting dalam pengendalian kegiatan pendulungan emas tanpa ijin di dalam wilayah operasi perusahaan.

percaya bahwa dengan berbagai pendekatan seperti manajemen risiko keamanan, kerja sama dengan pemerintah, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengembangan sosial ekonomi sebagai mata pencaharian alternatif dapat mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan emas tanpa ijin ini.

Insiden keamanan yang mulai terjadi di tahun 2017 berdampak pada berkurangnya kegiatan pendulangan tanpa ijin di dalam wilayah perusahaan, khususnya di dataran tinggi. Para pendulang di dataran tinggi menghentikan kegiatan pendulangan mereka dan kembali ke Kota Timika di dataran rendah. Meskipun tidak ada insiden keamanan signifikan di tahun 2018, pendulangan di dataran tinggi terus dibatasi. Sebagai akibatnya, kegiatan pendulangan tanpa ijin di dataran rendah mengalami peningkatan.

Kami melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dari kegiatan pendulangan ini pada tahun 2019. Pemantauan terhadap pendulang dan sosialisasi keselamatan menjadi kegiatan rutin untuk mengurangi risiko bagi pendulang dan karyawan. Kami juga memberdayakan 30 mantan pendulang untuk bekerja sebagai penjaga keamanan di jalan sekitar sungai aliran tailing. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada para pendulang tentang keselamatan dan keamanan di sekitar kegiatan

pendulangan. Koordinasi ini juga membantu mengatasi potensi konflik yang terkait dengan pemukiman ilegal dari para pendulang di sekitar aliran *tailings*.

Kami juga terlibat dalam seminar tentang penambangan rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seminar ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari perusahaan-perusahaan tambang tentang tantangan pengendalian penambangan rakyat dan penambangan tanpa ijin. Kami juga mengikuti diskusi kelompok (*focused group discussion*) yang dipimpin oleh Kepolisian Mimika untuk membahas opsi untuk mengurangi kriminalitas terkait pendulangan serta opsi lain yang relevan. Diskusi ini melibatkan pendulang, pemilik toko emas, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Meskipun belum ada solusi efektif terkait pengelolaan pendulang tanpa ijin, kami terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi perusahaan dan semua pihak terkait.

Penanganan Keluhan Masyarakat

PTFI menerima dan menangani keluhan masyarakat melalui Sistem Manajemen Keluhan Masyarakat. Pada tahun 2019, PTFI mengelola 60 keluhan dari masyarakat dimana 59 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keluhan yang diterima terkait tuntutan kompensasi hak ulayat, lingkungan, dan kompensasi jasa. Dari jumlah tersebut, lima belas keluhan merupakan keluhan terkait hak ulayat. Kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika untuk menyelidiki klaim terkait hak ulayat dan bekerja dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Kami juga melanjutkan sosialisasi hak komunal dan hukum positif terkait hak ulayat bersama BPN Kabupaten Mimika agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak ulayat. Gugus tugas hak ulayat yang meliputi unsur-unsur lintas departemen di PTFI dibentuk sebagai bagian dari mitigasi isu hak ulayat. Gugus tugas ini melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku



Dialog secara langsung dengan masyarakat menjadi langkah penting membangun hubungan yang baik dalam pelaksanaan investasi sosial perusahaan.



Perubahan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK) menjadi sebuah Yayasan dilakukan melalui serangkaian konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga perubahan ini berjalan dengan baik dan program-program yang telah direncanakan bagi masyarakat dapat tetap berjalan.

kepentingan lain dalam mengelola tuntutan hak ulayat. Melalui langkah-langkah ini, seluruh tuntutan hak ulayat bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. PTFI berkomitmen untuk mengelola keluhan dari masyarakat sesuai dengan prosedur guna menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Lokal

Lembaga-lembaga lokal yang menjadi representasi masyarakat asli di sekitar PTFI menjadi mitra perusahaan dalam melaksanakan komitmen sosialnya agar sejalan dengan nilai-nilai budaya dan adat setempat. Beberapa lembaga lokal utama yang bekerjasama dengan kami yaitu Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK), Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak). PTFI menjadi bagian dari sebuah forum komunikasi tripartit antara perusahaan dan perwakilan masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro yang dinamakan Forum MoU.

LPMMAK menjadi lembaga mitra yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI untuk menjalankan program-program pengembangan masyarakat. Kami melakukan pendampingan dalam pengelolaan Dana Kemitraan agar tercapai target akuntabilitas dan transparansi dana dan program. Pada tahun 2019, PTFI memberikan kontribusi Dana Kemitraan sebesar US\$ 27,7 juta kepada LPMMAK. Sejak awal program Dana Kemitraan pada tahun 1996, total Dana Kemitraan dari PTFI yang disalurkan melalui LPMMAK sebesar US\$ 825,7 juta. LPMMAK dikelola secara kolaboratif oleh perwakilan Suku Amungme dan Suku Kamoro, Pemerintah Kabupaten Mimika, Gereja, dan PTFI yang duduk di Badan Musyawarah dan Badan Pengurus. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur serta kegiatan-kegiatan agama, adat dan budaya di Kabupaten Mimika.

Pada tahun 2019, PTFI bersama LPMMAK sepakat bekerja bersama untuk merubah status LPMMAK dari Lembaga menjadi Yayasan. Berbagai langkah komunikasi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan berhasil dilakukan sehingga proses perubahan ini berjalan dengan baik. Dalam proses transformasi ini, program-program yang telah

direncanakan bagi masyarakat terus berjalan. Dengan perubahan tersebut, LPMK saat ini secara hukum telah bertransformasi menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK), efektif mulai akhir tahun 2019. Perubahan ini merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Kemitraan serta mencapai kemandirian lembaga di masa depan.

PTFI juga melanjutkan pengembangan kapasitas dan bantuan pendanaan kepada lembaga-lembaga adat (Lemasa dan Lemasko) dan yayasan lokal (Yahamak). PTFI mendampingi institusi-institusi tersebut dalam penyusunan program serta pengelolaan anggaran agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat adat. Berbagai pelatihan juga dilakukan untuk mendorong agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara lebih baik.

Pada tahun ini, kami mendampingi Lemasko dalam melaksanakan musyawarah adat yang diikuti oleh perwakilan masyarakat Kamoro dari 14 distrik di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Dalam musyawarah adat ini, Lemasko menyampaikan laporan pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat dan

melakukan pemilihan ketua lembaga untuk periode 2019-2024. Selain itu, PTFI mengadakan lokakarya bersama Yayasan Yuamako sebagai pengelola Dana Perwalian bagi masyarakat Suku Kamoro untuk penyesuaian pengelolaan Dana Perwalian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga mendampingi Yahamak dalam perubahan yayasan, restrukturisasi dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang baru. Pada tahun ini, Yahamak bertransformasi menjadi Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan (Yamak). Kami juga terus mendorong Lemasa agar segera menyelesaikan isu kepemimpinan lembaga sehingga program-program lembaga dapat segera berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kami berusaha membangun keterbukaan terhadap lembaga-lembaga lokal agar terbangun kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi mitra bagi perusahaan dan berkontribusi bagi pengembangan masyarakat. Kami percaya bahwa kepercayaan dan kerjasama dari masyarakat dan lembaga-lembaga lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan pertambangan dan program-program investasi sosial kami di Kabupaten Mimika.

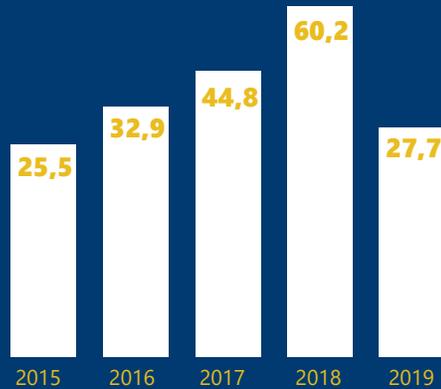


Lokakarya bagi Yayasan Yuamako yang mengelola Dana Perwalian bagi Suku Kamoro sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat adat.

Dukungan Bagi Lembaga-lembaga Lokal

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK)

Kontribusi Dana dari PTFI

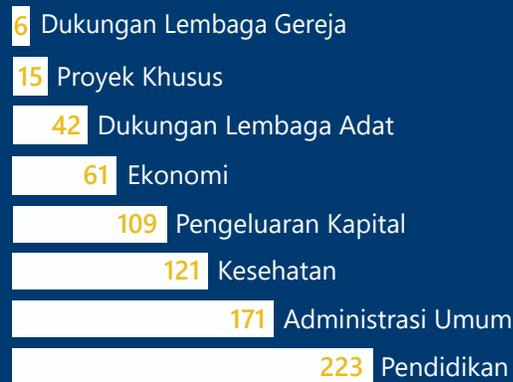


(Berbasis Akrual, Dalam Juta US\$)

Total Dana (1996-2019)

US\$ 825,7 Juta (Rp 8,3 Triliun)

Program LPMAK 2019



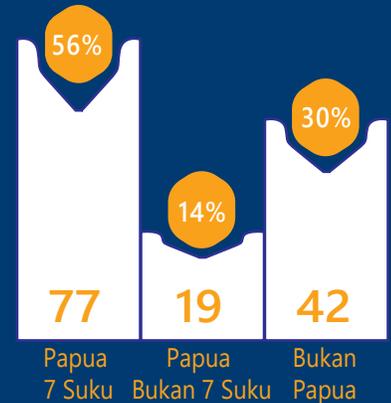
(Dalam Miliar Rupiah)

Total Anggaran (2019)

US\$ 55,2 Juta (Rp. 778,6 Miliar)

Karyawan LPMAK 2019

(Berdasarkan Suku)



Karyawan LPMAK

138 Orang

Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa)

2019
US\$ 1 Juta
(Rp. 14,5 Miliar)

2000-2019
US\$ 18,1 Juta
(Rp. 181 Miliar)

Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko)

2019
US\$ 2,7 Juta
(Rp. 38,7 Miliar)

2000-2019
US\$ 17,7 Juta
(Rp. 177 Miliar)

Forum MoU 2000

2019
US\$ 146 Ribu
(Rp. 2,1 Miliar)

2005-2019
US\$ 2,2 Juta
(Rp. 22 Miliar)

Yayasan Waartsing (Dana Perwalian Suku Amungme)

2019
US\$ 500 Ribu
(Rp. 7 Miliar)

2001-2019
US\$ 29,5 Juta
(Rp. 295 Miliar)

Yayasan Yuamako (Dana Perwalian Suku Kamoro)

2019
US\$ 500 Ribu
(Rp. 7 Miliar)

2001-2019
US\$ 28,4 Juta
(Rp. 284 Miliar)

Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan (Yamak)

2019
US\$ 177,7 Ribu
(Rp. 2,5 Miliar)

2001-2019
US\$ 6,7 Juta
(Rp. 67 Miliar)

● Kontribusi PTFI ● Kontribusi LPMAK

*Informasi finansial dalam lembar data ini menggunakan konversi rata-rata Rp. 10.000,- untuk kontribusi multi tahunan dan Rp 14.100,- untuk kontribusi tahun berjalan.

BUDAYA

Pengembangan budaya menjadi salah satu program investasi sosial PT Freeport Indonesia yang secara khusus memberi perhatian pada pelestarian dan promosi budaya asli Amungme dan Kamoro. Kami menyadari pentingnya budaya sebagai identitas yang harus dijaga di tengah perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini. Berbagai kegiatan promosi budaya dilakukan agar masyarakat lokal dapat tetap melestarikan budayanya meskipun hidup dan tinggal serta bersinggungan dengan berbagai macam budaya dari luar.

Pada tahun 2019, kami melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya Suku Kamoro yang sudah cukup dikenal luas. Promosi tersebut kami lakukan melalui kerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe. Yayasan ini bergerak dalam bidang promosi budaya Kamoro. Yayasan tersebut mendampingi sekitar 300 pengrajin yang menghasilkan produk seni yang berkualitas dan memasarkannya melalui pameran dan

galeri. Selain untuk promosi budaya, produk-produk seni tersebut juga memberi pemasukan tambahan bagi masyarakat karena hasil dari penjualan sepenuhnya dikembalikan kepada para pengrajin. Pada tahun 2019, Yayasan bersama para pengrajin, penganyam, dan penari Suku Kamoro juga melakukan promosi budaya di beberapa sekolah, perguruan tinggi dan institusi lain di Kota Timika dan luar Papua. Yayasan juga menginisiasi pembuatan film Maramowe yang bercerita mengenai budaya Kamoro. Film ini nantinya akan menjadi salah satu media untuk memperkenalkan budaya Papua bagi generasi muda Suku Kamoro maupun masyarakat pada umumnya.

PTFI juga turut serta dalam upaya pelestarian Noken yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kami melanjutkan pendampingan bagi kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Koperasi Kanguru Jaya dalam memproduksi kerajinan noken. Mereka mendapatkan pelatihan membuat noken dengan menggunakan alat sederhana. Hasil kerajinan noken ini juga dapat dipasarkan dan memberi penghasilan bagi ibu-ibu tersebut.



Promosi budaya Kamoro terus dilakukan agar masyarakat semakin mengenal kekayaan budaya masyarakat asli Papua.



Kerajinan tas Noken yang diproduksi oleh ibu-ibu memiliki nilai penting pelestarian budaya sekaligus peningkatan ekonomi keluarga.

HAK ASASI MANUSIA

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah beroperasi di Papua, Indonesia sejak tahun 1973 dan menerapkan Prinsip Sukarela Tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 2000. Kami melakukan berbagai langkah untuk menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM serta memberikan pelatihan dan promosi penegakan HAM kepada karyawan dan masyarakat. Kami menghormati hak setiap individu termasuk karyawan, masyarakat, mitra, dan siapapun yang mungkin terdampak dari operasi kami.

Pada tahun 2019, kami menerima 15 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal, diskriminasi dan intimidasi. Dua dari keluhan ini terkait dengan keamanan. Insiden itu dilaporkan ke polisi, dan empat polisi yang terlibat dipindahkan dari area tugas di PTFI. Dalam kasus lain, insiden itu dilaporkan kepada pimpinan militer dan sedang dalam proses penanganan pada akhir tahun 2019. Sistem pengaduan hak asasi manusia dikomunikasikan dan diketahui oleh karyawan, keluarga, dan setiap orang dalam wilayah proyek. Semua kasus yang dilaporkan kami dokumentasikan, analisa dan selesaikan, atau dalam proses ditindaklanjuti oleh Kantor HAM PTFI.

Serangkaian insiden keamanan masih terjadi di wilayah operasi perusahaan, terutama di dataran tinggi. Kejadian ini diklaim dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan mengakibatkan adanya korban luka dan meninggal. Keselamatan tenaga kerja kami menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan di dalam wilayah operasi PTFI dan sekitarnya. Kami juga membatasi penggunaan jalan darat menuju operasi penambangan, termasuk penggunaan kendaraan lapis baja untuk transportasi karyawan di area tertentu.

Kami terus terlibat dengan sejumlah pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional dalam

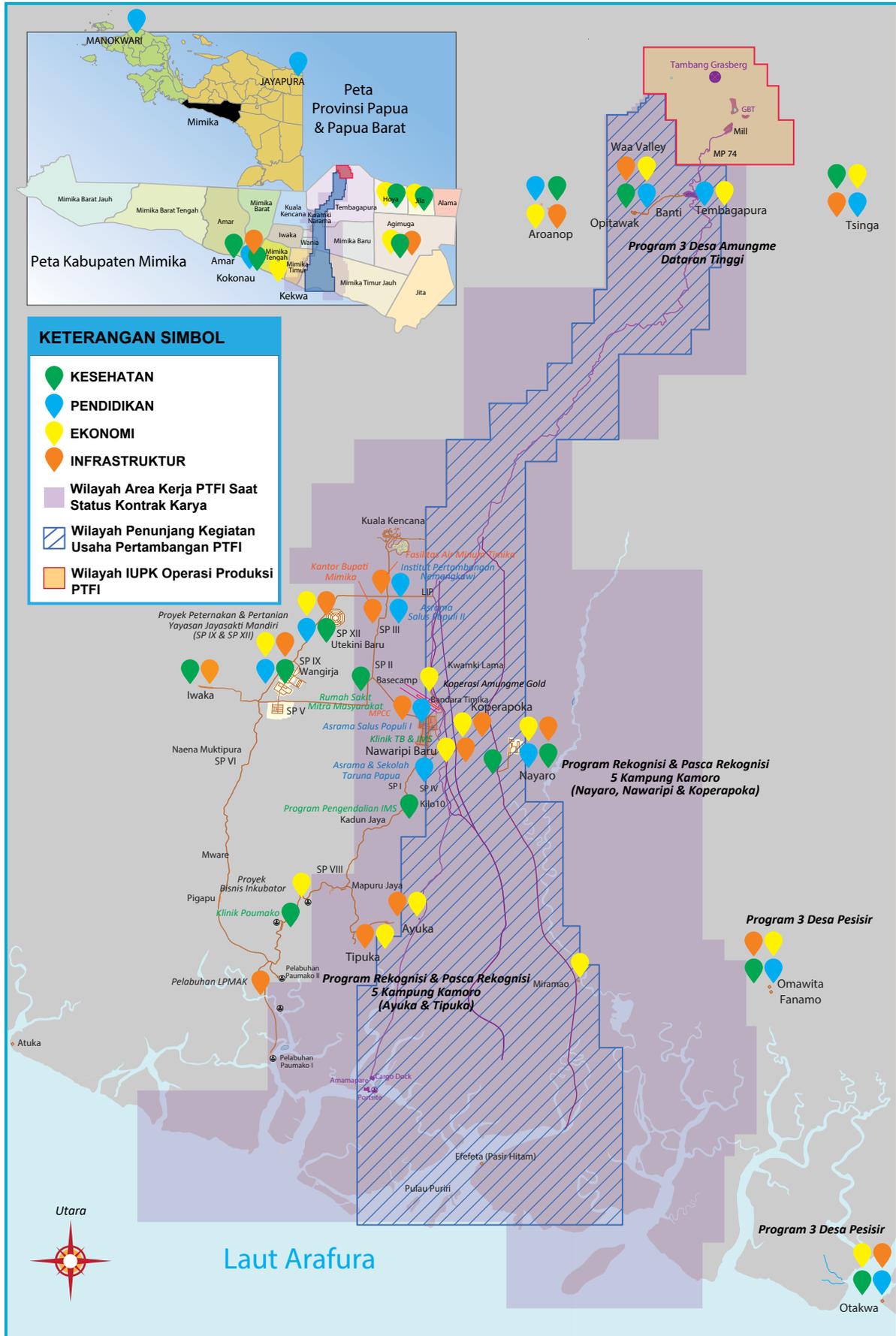


Kampanye Prinsip-prinsip Sukarela dalam Hak Asasi Manusia menjadi program wajib bagi karyawan PTFI, kontraktor dan privatisasi, serta petugas keamanan pemerintah

pelaksanaan Prinsip Sukarela dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 2019, Kantor HAM PTFI mengadakan pertemuan dengan LSM tingkat nasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti ELSAM untuk berkonsultasi tentang penerapan Prinsip Sukarela HAM dan insiden keamanan di PTFI. Kami juga bertemu dengan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) di Jakarta untuk membahas risiko-risiko terkait HAM, kebijakan dan posisi perusahaan terkait isu tenaga kerja di PTFI. Kami juga melibatkan masyarakat, organisasi mitra, dan pihak berwenang dengan melakukan sosialisasi program hak asasi manusia PTFI dan penerapan Prinsip Sukarela HAM.

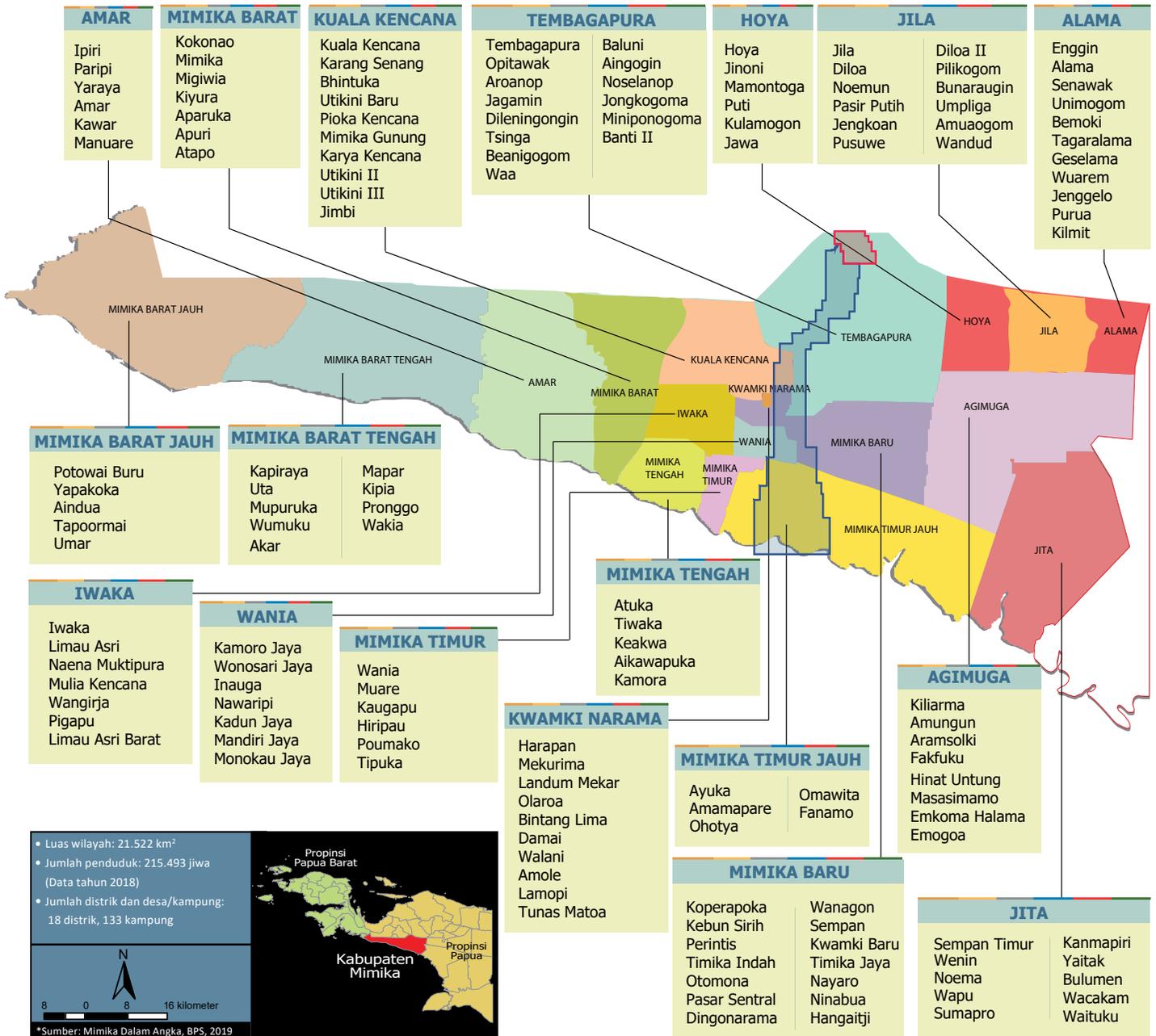
Pada tahun 2019, sekitar 1.580 karyawan PTFI, 4.400 karyawan kontraktor, 890 petugas keamanan PTFI dan perusahaan kontraktor, dan 1.700 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan HAM. Kantor HAM PTFI memberikan pelatihan HAM dan Prinsip Sukarela bagi 1.060 anggota polisi dan militer yang bertugas melakukan pengamanan obyek vital nasional. Semua karyawan PTFI diwajibkan mengikuti pelatihan HAM. PTFI juga meluncurkan program Duta HAM di mana perwakilan dari tujuh perusahaan kontraktor dilatih mempromosikan kebijakan HAM dan memberikan pelatihan HAM kepada tenaga kerja di perusahaan masing-masing.

Lampiran 1: Peta Program Pengembangan Masyarakat oleh PTFI



Lampiran 2: Peta Distrik Kabupaten Mimika

Wilayah administratif Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah sebesar 21.522 km² (4,75 persen dari luas wilayah Provinsi Papua) dan terdiri dari 18 distrik dengan 133 kampung atau desa. Berdasarkan data tahun 2018, populasi penduduk di Kabupaten Mimika sebanyak 215.493 jiwa.



Plaza 89, Lt. 5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940, Indonesia
+62 21 2591818
+62 21 2591945 (Faks.)

www.fcx.com

Office Building I
Jl. Mandala Raya Selatan No. 1
Kuala Kencana, Timika 99920, Papua - Indonesia
+62 901 432005
+62 901 432209 (Faks.)

www.ptfi.co.id